

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan

Dalam melakukan pembangunan pemerintah seharusnya melakukan perencanaan yang matang seperti yang dikemukakan Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembuatan perencanaan seharusnya melakukan penelitian mendalam terlebih dahulu supaya tepat sasaran dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Galtung *dalam* Trijono (2007) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Pembangunan tidak bisa dilakukan hanya satu aspek saja tetapi harus semuanya karena saling berkaitan. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat Alexander (1994). Sama halnya yang dikemukakan oleh Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pembangunan nasional yang perlu dipercepat dan diprioritaskan adalah dalam bidang pertanian karena Indonesia merupakan negara agraris. Bidang

pertanian dapat meningkatkan pendapatan perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang Sukirno (1995).

2.1.2 Pembangunan Daerah

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004) dalam M. Aziz Satriya Jaya. (2011) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/ pedoman/ acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan pemerintah harus memiliki data sektor yang harus dipercepat pembangunannya dan data potensi setiap daerah supaya pembangunannya tepat sasaran. Selaras dengan pernyataan Sjafrizal (2009), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Pembangunan dilakukan tidak hanya secara efisien saja tetapi harus dilakukan secara efektif supaya pembangunan bisa berjalan dengan cepat dan maksima selaras dengan pernyataan ML Jhingan (1984) dalam Syukrial (2015) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembangunan tersebut, yaitu ; ”Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.

Supaya tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka harus dilakukan penelitian karena kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah (2004) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul

sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa ; perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi *dalam* Muhammad Tahwin (2013) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi.

Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama. Suatu wilayah harus dibangun sesuai potensinya karena memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda selaras dengan pernyataan Jenssen (1995) *dalam* Abdul Kadir (2005) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga

prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi.

2.1.3 Teknik Analisis Perencanaan Wilayah

Untuk memantapkan metode perencanaan yang diterapkan oleh seorang perencana wilayah (*regional planner*) dalam proses penyusunan rencana, biasanya diterapkan berbagai teknik analisis pendukung. Oleh karena itu seorang perencana wilayah harus melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan pendukung terkait teknik analisis wilayah. Beberapa teknik analisis yang harus dimiliki seorang perencana wilayah diantaranya Tarigan, R. (2009) *dalam* Tasrif Landoala (2013):

- a) Teori lokasi, yang membahas berbagai prinsip yang terkait dengan lokasi, utamanya pengaruh jarak terhadap tingkah laku manusia. Intinya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan jarak dan ruang, pengetahuan bidang potensi lahan, kesesuaian lahan/kemampuan lahan (daya dukung lahan);
- b) Dasar-dasar ekonomi pembangunan dan ekonomi regional sebagai suatu pengetahuan akan prinsip-prinsip yang digunakan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhannya yang terkait dengan ruang. Hal ini dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membuat pilihan yang tepat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal-hal yang perlu dikuasai antara lain pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan umum pembangunan ekonomi, nilai tambah (*added value*), akuntansi regional, dan berbagai teori tentang pertumbuhan ekonomi regional, yang sebagian diambil dari teori ekonomi pembangunan tetapi telah dimodifikasi untuk menganalisis ekonomi wilayah seperti: teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori neoklasik, teori basis ekonomi, model ekonomi interregional, dan analisis input-output regional;

- c) Berbagai teknik analisis untuk mengetahui potensi dan struktur ekonomi wilayah menyangkut topik seperti: *Location Quotients* (LQ), *analisis shift-share*, berbagai teknik pengukuran indeks aksesibilitas (*accessibility index*) dan indeks sentralitas (*centrality index*), serta teknik perhitungan dan proyeksi perekonomian regional (PDRB);
- d) Berbagai metode perencanaan wilayah, baik yang sudah dibakukan atau yang lazim digunakan ataupun hasil inovasi sepanjang dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat diterima oleh masyarakat;
- e) Berbagai alat analisis atau tools dalam perencanaan wilayah menyangkut topik seperti: proyeksi penduduk, model gravitasi, pemrograman linier (*linear programming*), analisis statistik, *decision theory*, berbagai metode pembobotan/ skala prioritas, dan berbagai metode kuantitatif lainnya;
- f) Berbagai pengetahuan pendukung di bidang ekonomi seperti teori investasi publik, analisis biaya manfaat, evaluasi proyek, dan evaluasi program;
- g) Pengetahuan tentang keuangan daerah termasuk sumber-sumber dan metode pembiayaan pembangunan di daerah;
- h) Pengetahuan tentang kelembagaan daerah, yaitu lembaga mana yang berwenang dan bertanggung jawab untuk masing-masing jenis kegiatan di daerah;
- i) Pengetahuan tentang karakteristik dan sikap sosial masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembangunan;
- j) Topik-topik khusus seperti: tata ruang/tata guna lahan/tanah, perencanaan permukiman, perencanaan transportasi, analisis lingkungan hidup, dan lainnya yang biasanya dijadikan bidang profesi.

Pengetahuan/keahlian yang dikemukakan tersebut tidaklah kaku, artinya bisa saja berubah sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan waktu. Dalam perencanaan wilayah pengambilan kebijakan bisa mengadopsi teori Harrod-Domar. Harrod-Domar menganggap bahwa pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional tidak ditentukan oleh pertambahan kapasitas produksi masyarakat, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Walaupun kapasitas produksi bertambah, namun pendapatan nasional baru akan bertambah

dan pertumbuhan baru akan tercipta bila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan masa sebelumnya (Andro, dkk. 2018)

2.1.4 Komoditas Unggulan

Pengembangan pertanian ke depan berbasis pada potensi dan komoditas unggulan wilayah setempat. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, perkembangan teknologi, dan perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah Adanya perubahan permintaan diluar daerah dan kehabisan cadangan sumberdaya (Susilawati, dkk. 2016). Peningkatan peranan sektor basis akan meningkatkan atau memacu perkembangan sektor ekonomi lainnya, karena sektor basis akan memberikan efek pengganda kepada sektor lainnya. Akibatnya sektor non basis di daerah juga akan terangkat dengan peningkatan peranan sektor basis tersebut (Mardiana, dkk. 2017)

Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan masing-masing, bergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Tanaman pangan merupakan komoditas strategis dan menarik dalam kaitannya dengan isu peningkatan produksi dan jaminan ketersediannya. Kebutuhan pangan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.

Keterbatasan penguasaan lahan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan pertanian. Permasalahan tersebut disebabkan oleh konversi lahan pertanian ke non-pertanian, terutama lahan sawah, dan tidak diimbangi dengan pencetakan lahan (sawah) baru, dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Sudaryanto dan Rusastra (2006), luas penguasaan lahan per rumah tangga petani terus menurun, yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga petani. Lahan sawah mempunyai peluang lebih besar dikonversi dari pada lahan kering (Irawan, 2005). Keterbatasan lahan menyebabkan timbulnya persaingan dalam pemanfaatan lahan, baik antar-komoditas, antar-subsektor, maupun antar- sektor. Menurut Irawan (2005), persaingan pemanfaatan lahan disebabkan oleh fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumberdaya lahan, pertumbuhan penduduk dan

ekonomi. Keterbatasan lahan pertanian mendorong dilakukannya pemilihan komoditas unggulan sesuai zona agroekologi (ZAE). Pemilihan komoditas unggulan sesuai zona agroekologi dimaksudkan untuk mengurangi biaya usahatani, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Menurut Setiyanto (2013), komoditas unggulan adalah komoditas yang sesuai dengan agroekologi setempat dan juga mempunyai daya saing, baik di pasar daerah itu sendiri, di daerah lain lingkup nasional, maupun di pasar internasional. Zona agroekologi merupakan pengelompokan suatu wilayah berdasarkan kondisi fisik lingkungan yang hampir sama, dimana keragaman tanaman dan hewan diharapkan tidak berbeda nyata. Pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif merupakan langkah menuju efisiensi pembangunan pertanian Hendayana (2003). Djaenudin et al. (2002) menyatakan bahwa pendekatan pewilayahan komoditas pertanian dapat mengatasi penggunaan lahan yang kurang produktif menuju penggunaan lahan dengan komoditas unggulan yang lebih produktif. Syafruddin et al. (2004) mengungkapkan bahwa untuk membangun pertanian yang kuat, produktivitas tinggi, efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan diperlukan penataan sistem pertanian dan penetapan komoditas unggulan di setiap wilayah pengembangan.

2.1.5 Pangan

Pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 7 tahun 1996. Selanjutnya, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, maka ketahanan pangan dapat terwujud apabila pada tataran makro setiap saat tersedia pangan yang cukup baik jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau., sedangkan pada tataran mikro apabila setiap rumah tangga setiap saat mampu mengkonsumsi

pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya untuk dapat hidup produktif dan sehat.

Peningkatan Ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Selain itu Ketahanan Pangan merupakan hal yang penting dan strategis dalam pembangunan, karena pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan dapat dilakukan tanpa mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

2.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk.

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

tahun 2016–2021 adalah “Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, dinamis, dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis perdesaan”. Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

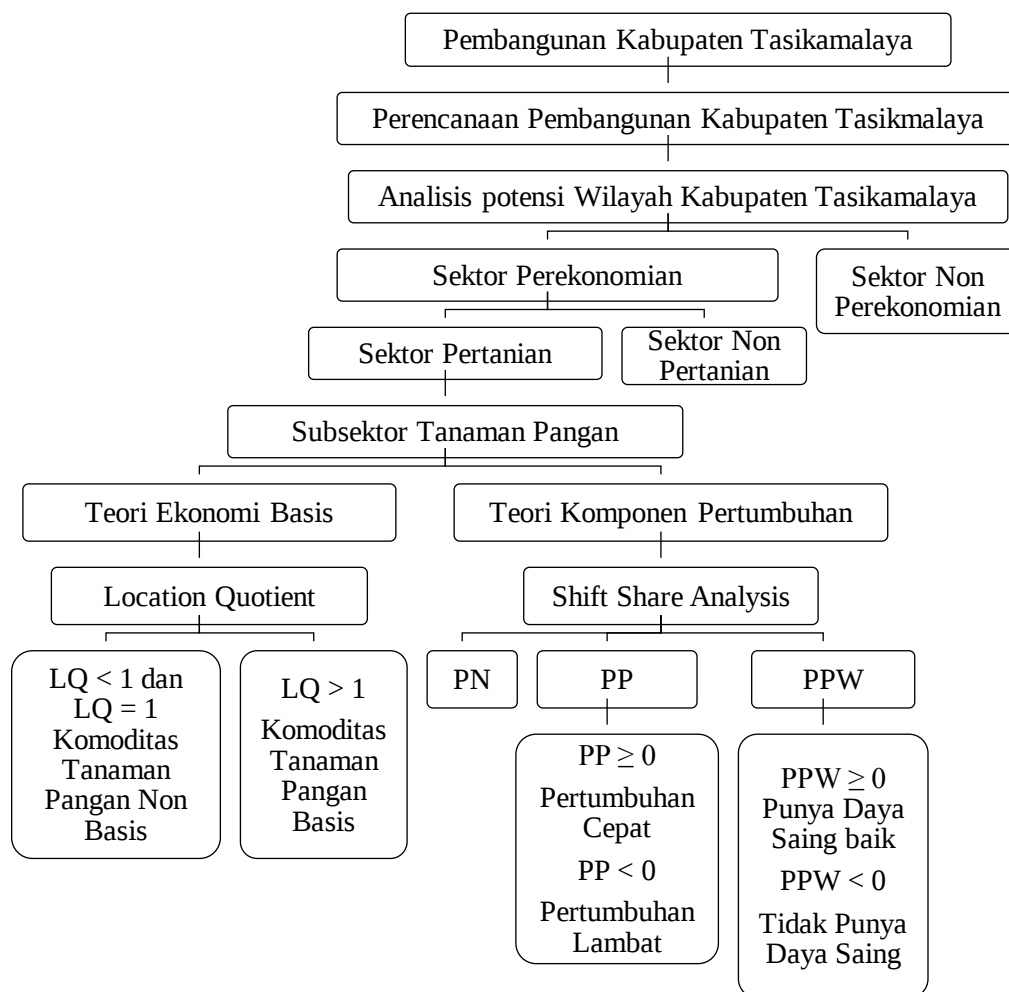
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
- 2) Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan Pariwisata. Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang

mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain. (Bappeda Kabupaten Tasikmalaya 2016)

Supaya pembuatan rencana pembangunan pertanian khususnya komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya tersusun secara baik dan sesuai yang di inginkan maka perlu adanya analisis unggulan tanaman pangan agar mengetahui potensi tanaman pangan di setiap daerah. Di bawah ini adalah alur pemikiran analisis komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

1. Diagram Alur Pemikiran Analisis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Tasikmalaya



Dari diagram alur pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa *Metode Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui komoditas tanaman pangan basis atau non basis di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara menghitung nilai LQ dari setiap komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Apabila nilai $LQ > 1$ maka komoditas tanaman pangan tersebut termasuk komoditas tanaman pangan basis. Apabila nilai $LQ \leq 1$ maka komoditas tanaman pangan tersebut termasuk komoditas tanaman pangan non basis.

Teori komponen pertumbuhan (analisis *Shift Share*) digunakan untuk mengetahui komponen pertumbuhan komoditas tanaman pangan basis di Kabupaten Tasikmalaya. Komponen pertumbuhan dalam analisis *Shift Share* meliputi komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Apabila PP positif, maka komoditas tanaman pangan tersebut pertumbuhannya cepat dan sebaliknya apabila PP negatif, maka komoditas tanaman pangan tersebut pertumbuhannya lambat. Apabila PPW positif, maka komoditas tanaman pangan tersebut mempunyai daya saing yang baik jika dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan yang sama di wilayah lainnya dan sebaliknya apabila PPW negatif, maka komoditas tanaman pangan tersebut tidak mempunyai daya saing jika dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan yang sama di wilayah lainnya.

Penentuan prioritas komoditas tanaman pangan basis yang layak dikembangkan dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan menggunakan gabungan analisis Ekonomi Basis (metode LQ) dan analisis *Shift Share* (analisis komponen pertumbuhan proporsional/PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah/PPW). Komoditas tanaman pangan basis yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan adalah komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai $LQ > 1$, PP positif dan PPW positif. Komoditas tanaman pangan basis yang menjadi prioritas kedua untuk dikembangkan adalah komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai $LQ > 1$, PP negatif, PPW positif dan atau komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai $LQ > 1$, PP positif, PPW negatif. Komoditas tanaman pangan basis yang menjadi prioritas alternatif untuk

dikembangkan adalah komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai $LQ > 1$, PP negatif, dan PPW negatif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan dan berpotensi untuk di kembangkan sehingga banyak penelitian tentang pangan, seperti: analisis komoditas unggulan pertanian tanaman pangan berdasarkan metode *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2016 yang dilakukan oleh Anisa Arya Luvianita, subsektor pertanian unggulan Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2005-2014 yang dilakukan oleh Sri Hidayah, dan penentuan komoditas unggulan tanaman pangan dan ternak ruminansia di Kabupaten Tasikmalaya oleh Riantin Hikmahwidi.

1. Lahan sawah yang cukup luas ini maka untuk mengembangkan hasil pertanian padi kesempatannya lebih besar atau lebih potensial, dominasi jenis tanah di kecamatan jaten adalah aluvial kelabu, Alluvial merupakan tanah muda hasil pengendapan material halus aliran sungai, Kesuburan tanah alluvial sangat bergantung pada sumber bahan asal aliran sungai, Tanah aluvial meliputi lahan yang sering mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda, jenis tanah ini cocok untuk pertanian termasuk padi dan didukung juga dengan curah hujan rata-rata di kecamatan matesih cukup bagus untuk pertanian yaitu 1500-2000 mm/th sudah sangat cukup untuk pengairan sawah.
2. Luas areal panennya harus cukup luas dan jenis tanah yang paling yang cocok untuk tanaman jagung jenis tanah latosol coklat kemerahan yang sangat baik untuk pertanian lahan kering seperti jagung yaitu 68 persen dari luasan total kecamatan serta curah hujan dominan di Kecamatan Jatiyoso adalah 2500-3000 mm/th.
3. Sektor basis di Kabupaten Tasikmalaya adalah sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Sementara yang termasuk dalam sektor non basis adalah sub sektor tanaman bahan makanan dan subsektor peternakan.

4. Hasil analisis SLQ di Kabupaten Tasikmalaya padi sawah merupakan komoditas unggulan untuk kecamatan Pancatengah, Cibalong, Bojonggambir, Sodonghilir, Salopa, Cineam, Karangjaya, Manonjaya, Singaparna, Sukarame, Mangunreja, Cigalontang, Leuwisari, Sariwangi, Padakembang, Sukaratu, Cisayong, Sukahening, Rajapolah, Jamanis, Ciawi, Pagerageung, Sukaresik.
5. Hasil analisi SLQ di Kabupaten Tasikmalaya jagung merupakan komoditas unggulan untuk kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Pancatengah, Cibalong, Culamega, Taraju, Salawu, Jatiwaras, Cineam, Karangjaya, Sukahening, Kadipaten.